



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 1.4 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu instrumen dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah adalah penegakan integritas dan mewujudkan pelayanan yang pembangunan Zona Integritas;
 - b. bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, diperlukan dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - c. bahwa salah satu komponen dalam Zona Integritas adalah Manajemen Perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir serta budaya kerja individu pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah secara sistematis dan konsisten sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tentang Budaya Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) terakhir kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) terakhir kali diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH.
- KESATU : Menetapkan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dengan slogan "*Luwih Becik Luwih Nyenengke*" (Lebih Baik, Lebih Menyenangkan) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 6 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dewantoputra Adhipermana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 1.4 TAHUN 2025
TENTANG BUDAYA KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH

BUDAYA KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH

Budaya kerja dengan slogan "Luwih Becik Luwih Nyenengke" (Lebih Baik, Lebih Menyenangkan) adalah filosofi untuk menggambarkan semangat perbaikan yang membawa hasil yang berkualitas, dan juga memberikan kenyamanan dan kebahagiaan bagi semua pihak.

A. Budaya Kerja MELAYANI Memberikan pelayanan yang Jujur, Adil, Akuntabel, Cepat, Tepat, Bersih, Tanpa biaya, dan Menyenangkan.

1. Jujur adalah sikap dan perilaku yang diungkapkan, dilakukan, atau diputuskan harus sesuai dengan kebenaran dan fakta, tanpa ada penyembunyian atau manipulasi;
2. Adil adalah memberikan Pelayanan yang setara pada setiap orang tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak setara;
3. Akuntabel adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan;
4. Cepat adalah pelayanan yang dilakukan dalam waktu yang singkat, tidak berlarut-larut;
5. Tepat adalah pelayanan yang memberikan kepastian kepada pemohon layanan;
6. Bersih adalah bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
7. Tanpa biaya adalah memberikan pelayanan publik secara gratis, kecuali secara spesifik diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Menyenangkan adalah pelayanan yang memberikan kebahagiaan, kegembiraan, atau kepuasan.

B. Menerapkan budaya MALU

1. Malu Terlambat Masuk Kantor;
2. Malu Tidak Ikut Apel;
3. Malu Sering Tidak Masuk Kerja;
4. Malu Pulang Kerja Sebelum Waktunya;
5. Malu Sering Lupa Mengisi Absen Hadir dan Pulang;
6. Malu Sering Minta Izin Tidak Masuk Kerja;
7. Malu Bekerja Tanpa Program;
8. Malu Bekerja Tanpa Tanggung Jawab;
9. Malu Pekerjaan Terbengkalai;
10. Malu Sering Meninggalkan Meja Kerja Tanpa Alasan Penting;
11. Malu Berpakaian Seragam Tidak Sesuai Aturan;
12. Malu Tidak Bertata Krama dan Sopan Santun.

C. ASN BerAkhlak yang harus dipahami dan di internalisasi agar menjadi landasan filosofi bekerja pegawai adalah sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Berkomitmen melaksanakan tugas melayani masyarakat dengan sepenuh hati dan mengutamakan kepentingan umum, dari pada kepentingan pribadi.

Panduannya adalah :

- a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
- b. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan.
- c. Melakukan perbaikan terus menerus.

2. Akuntabel

Berkomitmen terhadap suatu layanan dengan memberikan pelayanan yang terpercaya dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaan yang diemban.

Panduannya adalah:

- a. Melaksanakan tugas dengan jujur, cermat, bertanggung jawab, disiplin dan berintegritas tinggi.
- b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bijak, bertanggung jawab, efektif dan efisien.
- c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3. Kompeten

ASN harus mampu mengembangkan diri sesuai bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri agar mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat demi pengabdian kepada bangsa dan negara.

Panduannya adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
- b. Membantu ASN lain belajar.
- c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

4. Harmonis

Menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan membangun hubungan yang harmonis dengan saling menghormati dan berbuat baik antar ASN maupun dengan masyarakat.

Panduannya adalah:

- a. Menghargai setiap ASN.
- b. Suka menolong ASN.
- c. Mengutamakan lingkungan kerja yang kondusif.

5. Loyal

Bukan tentang seberapa lama waktu yang dihabiskan namun lebih bagaimana ASN berkomitmen untuk mengerahkan semua kemampuannya demi memajukan organisasi yang menaunginya.

Panduannya adalah :

- a. Memegang teguh ideologi Pancasila dan UUD 45, setia pada NKRI dan Pemerintah.
- b. Menjaga nama baik ASN, pemimpin, instansi dan negara.
- c. Menjaga rahasia jabatan negara.

6. Adaptif

Mudah menyesuaikan diri secara positif dengan beragam situasi dan keadaan.

Panduannya adalah:

- a. Cepat menyesuaikan diri terhadap perubahan.
- b. Terus berinovasi mengembangkan kreativitas.
- c. Bertindak proaktif.

7. Kolaboratif

Asn harus mampu membangun kerjasama yang sinergis dengan beragam elemen yang ada.

Panduannya adalah:

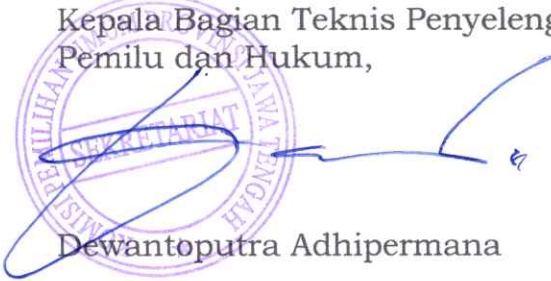
- a. Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b. Terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah.
- c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH,

ttd.

HANDI TRI UJIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA TENGAH
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Dewantoputra Adhipermana